KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cerita dari Skotlandia, Ketika Partai Membukakan Jalan bagi Perempuan Politisi
Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Cerita dari Skotlandia, Ketika Partai Membukakan Jalan bagi Perempuan Politisi

Kurnia Yunita Rahayu

Dengan suara bulat dan penuh kepercayaan diri, Karen Gillon mulai berpidato di hadapan anggota Parlemen Skotlandia, 9 Juni 1999. Raut wajah perempuan pekerja yang dibesarkan dalam keluarga miskin di sudut kota Jedburgh itu tak bisa menyembunyikan kebanggaan bisa berada di tengah para perumus undang-undang dan kebijakan di negara yang merupakan bagian dari Britania Raya itu.

Bagaimana tidak? Gillon menjadi perempuan pertama yang terpilih mewakili Clydesdale dalam pemilu pertama yang digelar setelah devolusi Skotlandia pada 1999.

"Tentu saja saya bangga untuk diri sendiri, keluarga, dan teman-teman saya. Namun, saya lebih bangga lagi untuk warga Clydesdale. Dengan mengirim saya ke sini, mereka memberikan tanda yang jelas mengenai Skotlandia baru," kata Gillon dalam pidatonya, dikutip dari arsip rapat yang dipublikasikan di situs resmi Parlemen Skotlandia, Senin (4/10/2026).

Bagi Gillon, harapan akan terwujudnya Skotlandia Baru kian besar dengan adanya kesediaan warga mendukung perempuan dengan latar belakang seperti dirinya. Sebab, tidak hanya berasal dari kelas pekerja, politisi Partai Buruh Skotlandia itu juga dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang setiap hari berjuang bertahan hidup sebagai buruh dengan upah sangat rendah. Dengan demikian, bagi Gillon, komitmen dalam mewujudkan parlemen bagi semua kalangan masyarakat semakin terasa nyata.

Gillon bukan perempuan satu-satunya yang terpilih sebagai anggota Parlemen Skotlandia pada pemilu perdana tersebut. Ada 47 perempuan politisi lainnya yang juga terpilih. Dari total 129 anggota parlemen terpilih, 48 merupakan perempuan. Artinya, proporsi perempuan mencapai 37 persen, melampaui ambang 30 persen yang selama ini menjadi patokan dalam pembahasan keterwakilan perempuan.

Di internal partai asal Gillon, proporsi keterpilihan perempuan lebih tinggi lagi. Dari 56 anggota parlemen terpilih dari Partai Buruh, 28 orang adalah perempuan.

Tingginya keterpilihan perempuan itu tak terlepas dari perjuangan untuk membangun keadilan jender di parlemen. Sejak awal 1990-an, kelompok perempuan, tidak terkecuali politisi, aktif menggelar diskusi publik hingga konvensi. Tujuannya untuk menginternalisasi urgensi keterwakilan perempuan dalam politik.

Gerakan itu memuncak pada 1995 ketika konvensi menghasilkan laporan berjudul "Scotland's Parliament, Scotland's Right". Salah satu rekomendasinya adalah memilih anggota parlemen dengan *additional member system* (AMS). Sistem yang memungkinkan pemilih memiliki dua suara untuk menentukan kursi daerah pemilihan dan kursi regional. Partai-partai politik juga menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan representasi yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Gagasan tersebut memperoleh bentuk kelembagaan setelah Partai Buruh memenangi pemilu Inggris pada 1997. Pemerintah menerbitkan "White Paper Scotland's Parliament" pada Juli 1997 yang mengurai rancangan pembentukan parlemen baru Skotlandia. Setelah referendum pada September tahun yang sama, desain AMS dalam pemilihan anggota parlemen dituangkan dalam Scotland Act 1998.

Pencalonan 50:50

Dalam sistem AMS tersebut, partai memiliki ruang untuk menentukan bagaimana kandidat perempuan ditempatkan dalam kompetisi elektoral. Langkah paling menonjol dari Partai Buruh adalah menerapkan mekanisme *twinning*.

Dalam mekanisme itu, partai memasangkan dua daerah pemilihan yang memiliki peluang menang besar untuk mencalonkan satu kandidat perempuan di satu daerah dan satu laki-laki di daerah lainnya. Dengan demikian, kandidat perempuan tidak sekadar dicalonkan, tetapi juga ditempatkan di daerah yang memiliki peluang untuk menang.

Parlemen Skotlandia menyatakan parpol-parpol kembali meningkatkan upaya untuk mewujudkan keadilan jender jelang pemilu 2021.

"Women 50:50 itu adalah ambisi kami agar parlemen bisa merepresentasikan seluruh negara dan perempuan," kata Sarah Boyack, anggota Parlemen Skotlandia 1999-2016 dan 2019-2026 dari Partai Buruh, dalam rapat Komite Kesetaraan, Hak Asasi, dan Keadilan Sipil Parlemen Skotlandia, 19 November 2024.

Meski belum bisa menghasilkan keterwakilan perempuan hingga 50 persen di setiap pemilu, kata Boyack, penerapan mekanisme *twinning* membawa Skotlandia mendekati angka tersebut. Mengacu data Parlemen Skotlandia, tingkat keterwakilan perempuan dalam tujuh kali pemilu empat tahunan sejak 1999 hingga 2026 selalu di atas 30 persen. Dari 37,2 persen pada 1999, naik menjadi 39 persen pada 2003.

Kemudian pada tiga pemilu berikutnya, sempat ada penurunan menjadi 33,3 persen (2007) ke 34,9 persen (2011 dan 2016). Namun, pada 2021 keterwakilan perempuan melonjak ke 45 persen, lalu sedikit menurun menjadi 43 persen pada 2026, tetapi masih jauh di atas 30 persen.

Menurut Boyack, peningkatan keterwakilan di berbagai partai harus diapresiasi. Sebab, itu merupakan hasil dari mekanisme afirmasi yang diterapkan parpol demi mewujudkan keadilan jender.

Di Partai Buruh Skotlandia, mekanisme itu dilakukan dengan model pendampingan (mentoring) dan *shadowing*. Mengajak kader perempuan melihat langsung bagaimana anggota parlemen bekerja dan berkontribusi. Partai juga memiliki struktur yang disebut Komite Perempuan. Komite ini menyelenggarakan konferensi tahunan untuk membangun jaringan, memberikan saran, dan menjadi wadah bagi para kader perempuan untuk berbagi pengalaman.

Konsistensi partai

Sejumlah mekanisme afirmasi yang diterapkan partai itulah yang menurut Boyack menjadi faktor pendukung tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen Skotlandia bisa mencapai 45 persen. Namun, ia menekankan bahwa itu bukan langkah yang bisa dilakukan tanpa konsistensi. Sebab, sejumlah tantangan tetap harus dihadapi perempuan ketika berkontestasi dalam pemilu.

Contohnya, perempuan kerap mengalami kerugian ekonomi ketika berkampanye. Bagi mereka yang berasal dari kelas pekerja, pemberi kerja juga belum tentu mengizinkan pekerjanya untuk mengikuti pemilu. Masih ada pula sikap sosial yang merendahkan ekspektasi terhadap kandidat perempuan dan diskriminasi yang terjadi di media sosial.

Di tengah konteks tersebut, tak semua parpol juga bisa menjaga konsistensi. Meryl Kenny dalam buku *Gender and Political Recruitment, Theorizing Institutional Change*, 2013, menjelaskan, penurunan tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen Skotlandia pada Pemilu 2007 dan 2011 juga dipengaruhi oleh perubahan kaderisasi dan kebijakan partai.

Pada tahun-tahun tersebut, tulis Meryl Kenny, mayoritas parpol sudah tidak menerapkan langkah-langkah untuk membuat kuota minimal calon anggota legislatif perempuan dan sistem *twinning*. Bahkan, Partai Buruh Skotlandia yang gencar mempromosikan wacana parlemen adil jender pun menguranginya dengan membuat promosi hanya secara halus.

Talat Yaqoob, peneliti dan pendiri Women 50:50, dalam rapat di Parlemen Skotlandia pada November 2024 juga mengungkapkan, berbagai mekanisme afirmasi, seperti *twinning* dan *zipping* (menyusun daftar kandidat anggota legislatif berdasarkan urutan jenis kelamin secara bergantian), belum dilaksanakan secara konsisten oleh parpol-parpol di Skotlandia pada awal 2000-an.

Dalam beberapa kasus, mekanisme afirmasi kerap diterapkan terlambat, hanya jelang pemilu berlangsung. Padahal, mekanisme afirmasi akan lebih efektif jika diterapkan jauh-jauh hari sebelum pemilu.

Dalam pernyataan resminya, Parlemen Skotlandia menyatakan parpol-parpol kembali meningkatkan upaya untuk mewujudkan keadilan jender jelang pemilu 2021. Itu terbukti dengan capaian tingkat keterwakilan perempuan yang tertinggi dalam sejarah Skotlandia, yakni hingga 45 persen pada 2021.

Perjalanan Skotlandia menunjukkan afirmasi perempuan tidak berhenti pada aturan. Ketika partai mengubah cara merekrut, menyeleksi, menempatkan, dan menyiapkan kandidat, perempuan punya peluang lebih besar untuk masuk parlemen. Sebaliknya, saat komitmen itu melemah, keterwakilan ikut turun.

Pengalaman ini memicu pertanyaan bagi Indonesia, yang selama lebih dari dua dekade telah memiliki aturan kuota 30 persen perempuan, tetapi belum pernah mencapai keterwakilan perempuan hingga 30 persen di parlemen. Apakah partai hanya memenuhi angka atau benar-benar membangun jalan bagi perempuan untuk memenangi dan menjalankan kekuasaan politik?